BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata internasional berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan dinamis dalam tatanan ekonomi global kontemporer. *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) mencatat bahwa sebelum terjadinya pandemi COVID-19, sektor pariwisata global berhasil mencatat kedatangan wisatawan internasional sebesar 1,5 miliar kunjungan pada tahun 2019, dengan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global mencapai sekitar 10,4% serta menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 330 juta orang di seluruh dunia (UNWTO 2020). Meskipun pandemi COVID-19 sempat melemahkan sektor ini secara drastis pada tahun 2020 dan 2021, namun pemulihan yang signifikan sudah terjadi sejak paruh kedua tahun 2022 dan terus berlanjut hingga 2024. UNWTO melaporkan bahwa kunjungan wisatawan internasional global pada tahun 2023 telah mencapai 88% dari level prapandemi (UNWTO 2024).

Tren global pemulihan pariwisata ini memberikan peluang yang strategis dan signifikan bagi Indonesia, khususnya dalam upaya pemerintah mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menempatkan pariwisata sebagai salah satu dari empat sektor prioritas ekonomi yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan devisa negara (Bappenas 2020). Berdasarkan arah kebijakan nasional tersebut, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada saat itu secara konsisten menjadikan diplomasi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* - FDI) di sektor pariwisata guna mempercepat pengembangan infrastruktur dan suprastruktur pariwisata di berbagai destinasi strategis di Indonesia (Sulthon Sjahril Sabaruddin 2016; Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2015).

Dalam konteks geopolitik dan geoekonomi Asia Tenggara, Batam merupakan salah satu wilayah yang memiliki posisi paling strategis dalam peta persaingan destinasi investasi pariwisata di kawasan ini. Pulau Batam, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, berada pada posisi geografis yang sangat menguntungkan, yakni hanya sekitar 20 kilometer dari

Singapura dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari satu jam dengan kapal feri ekspres (BP Batam 2023). Kedekatan geografis ini menjadikan Batam sebagai destinasi pariwisata bagi jutaan wisatawan dari Singapura, Malaysia, dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam tahun 2023 menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Batam sekitar 56,46% kunjungan didominasi oleh warga negara Singapura lalu diikuti oleh wisatawan dari Malaysia, India, dan Tiongkok (BPS Batam 2023; BP Batam 2023)

Namun, meskipun potensi pariwisata Batam sangat besar, ini belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Meskipun Batam memiliki beragam daya tarik wisata seperti wisata bahari, wisata belanja, wisata kuliner, wisata MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*), hingga wisata kesehatan (*medical tourism*), infrastruktur dan suprastruktur pariwisata di Batam masih belum memadai untuk mengakomodasi arus kunjungan wisatawan dalam skala besar dan berkualitas tinggi (Supriono 2017). Permasalahan yang sering diidentifikasi meliputi keterbatasan hotel berbintang berkualitas internasional, minimnya aksesibilitas transportasi yang terintegrasi, kurangnya atraksi wisata berstandar internasional yang mampu menarik wisatawan premium, serta rendahnya investasi di sektor jasa pariwisata yang memiliki nilai tambah tinggi (Andini and Akbar 2020).

Untuk mengatasi kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut, maka diperlukan arus investasi asing yang substansial di sektor pariwisata Batam, khususnya dari investor-investor yang memiliki keahlian, modal, dan jaringan pasar internasional yang kuat. Singapura, sebagai negara tetangga terdekat dan mitra ekonomi utama Indonesia, memiliki posisi yang sangat strategis sebagai sumber FDI potensial di sektor pariwisata Batam. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2023, Singapura secara konsisten menjadi investor asing terbesar di Indonesia dengan total realisasi investasi mencapai USD 15,3 miliar pada tahun 2023, yang menjadikannya negara dengan FDI terbesar ke Indonesia untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut (BKPM 2024). Di Batam, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dari Singapura mencapai USD 1,2 miliar pada periode 2021-2023, dengan sebagian mulai merambah ke sektor jasa dan pariwisata di luar sektor manufaktur tradisional yang selama ini mendominasi (BP Batam 2024).

Di sinilah letak relevansi sentral dari penelitian ini, yakni bagaimana Indonesia melalui instrumen diplomasi ekonominya secara strategis dan efektif menarik FDI asal Singapura untuk dialirkan ke sektor pengembangan pariwisata di Batam? Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi pertimbangan peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai

aktor kelembagaan yang berfungsi sebagai mediator antara kepentingan investor asing yang menuntut kepastian, efisiensi, dan *return on investment* yang kompetitif dengan kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia di tingkat nasional maupun daerah. BP Batam, sebagai otoritas tunggal pengelola kawasan strategis Batam, memiliki kewenangan yang sangat luas dalam hal perizinan investasi, pengelolaan lahan, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait, yang secara keseluruhan menjadikannya aktor yang tidak dapat diabaikan dalam dinamika menarik investasi pariwisata dari Singapura (Syuzairi et al. 2022)

Konsep diplomasi ekonomi dalam penelitian ini merujuk pada penggunaan instrumen dan jaringan diplomatik untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi suatu negara, termasuk promosi ekspor, atraksi investasi asing, dan penguatan kerja sama ekonomi bilateral (Maaike Okano-Heijmans 2011; Kishan S. Rana 2015). Dalam konteks hubungan Indonesia-Singapura, diplomasi ekonomi telah berlangsung secara intensif dan terstruktur melalui berbagai mekanisme, antara lain, yakni pertemuan bilateral di tingkat kepala negara dan menteri, *Working Group on Batam-Bintan-Karimun and other SEZs* (BBK *Working Group*) yang mempertemukan para pejabat tinggi kedua negara secara rutin, perjanjian kerangka kerja sama ekonomi (*Framework Agreement for Economic Cooperation*), serta berbagai forum bisnis dan *Investment Promotion* yang melibatkan pelaku usaha dari kedua negara (Kementerian Perekonomian 2022; Achmad and Nasir 2022)

Landasan historis hubungan ekonomi Indonesia-Singapura di kawasan Batam dapat ditelusuri jauh ke belakang. Sejak awal pembangunan Batam pada dekade 1970-an di bawah kepemimpinan Otorita Batam yang dipimpin oleh B.J. Habibie, Singapura telah dipandang sebagai mitra strategis yang dapat menjadi penggerak bagi industrialisasi dan modernisasi Batam (Arjuna and Harto 2016). Perkembangan lebih lanjut terjadi ketika pemerintah Indonesia menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*/FTZ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, yang kemudian memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan investasi di kawasan tersebut. Pada tahun 2006, dalam kerangka bilateral Indonesia-Singapura, disepakati pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi yang mencakup Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), yang menjadi salah satu model kerja sama lintas-batas paling ambisius di Asia Tenggara (Arjuna and Harto 2016).

Dalam perkembangannya, kerja sama ekonomi Indonesia-Singapura di kawasan Batam telah menghasilkan sejumlah pencapaian investasi yang signifikan. Pada tahun 2015, realisasi investasi Singapura di Indonesia dalam kerangka BBK mencapai USD 2,5 miliar, dan *Joint Investment Promotion* antara kedua pemerintah berhasil mempromosikan kawasan

BBK ke negara-negara Asia Timur lainnya (Arjuna and Harto 2016). Sementara itu, investasi Singapura di Indonesia secara keseluruhan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan total FDI sebesar USD 9,3 miliar yang tersebar di tidak kurang dari 16.760 proyek di seluruh Indonesia (Kementerian Perekonomian 2022). Namun yang menarik, sebagian besar investasi Singapura di Batam masih terkonsentrasi di sektor manufaktur elektronik, logistik, dan yang terbaru ekonomi digital, sementara sektor pariwisata yang memiliki potensi besar mengingat kedekatan geografis dengan Singapura dan tingginya volume kunjungan wisatawan Singapura ke Batam masih belum mendapatkan porsi investasi yang proporsional (BP Batam 2024; BPS Batam 2023).

Kesenjangan antara potensi pariwisata Batam yang besar, dominasi wisatawan Singapura, dan relatif rendahnya investasi Singapura di sektor pariwisata Batam inilah yang menjadi persoalan akademik utama yang mendorong penelitian ini. Secara teoretis, terdapat dua penjelasan yang mungkin untuk menjelaskan fenomena ini. Pertama, mungkin saja instrumen diplomasi ekonomi yang telah dijalankan oleh Indonesia belum secara spesifik dan intensif mengarahkan investor Singapura ke sektor pariwisata Batam. Kedua, mungkin ada hambatan-hambatan struktural dan kelembagaan di tingkat lokal yang membuat investor Singapura ragu-ragu untuk menanamkan modal di sektor pariwisata Batam, meskipun mereka sudah familiar dengan kawasan tersebut. Dalam konteks inilah, peran BP Batam sebagai mediator menjadi sangat krusial, apakah BP Batam sudah memainkan peran fasilitasi yang optimal dalam mendorong masuknya investasi Singapura ke sektor pariwisata?

Dari perspektif Hubungan Internasional, khususnya dalam kerangka Ekonomi Politik Internasional (EPI), studi tentang hubungan antara diplomasi ekonomi, investasi asing, dan pengembangan pariwisata di tingkat sub-nasional masih relatif terbatas. Sebagian besar literatur tentang diplomasi ekonomi Indonesia berfokus pada dimensi perdagangan ekspor atau investasi secara umum tanpa menyentuh sektor pariwisata secara khusus (Sulthon Sjahril Sabaruddin; Mariene Delanova 2016). Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis diplomasi ekonomi, investasi pariwisata, dan peran kelembagaan mediator dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Lebih lanjut, terdapat dimensi kebaruan (*novelty*) yang signifikan dalam penelitian ini. Jika sebagian besar studi tentang BP Batam berfokus pada peran lembaga tersebut dalam menarik investasi manufaktur atau investasi secara umum (Syuzairi et al. 2022; Edmira Rivani 2016). Penelitian ini secara spesifik memfokuskan analisis pada peran mediasi BP Batam dalam konteks diplomasi ekonomi untuk menarik FDI Singapura di sektor pariwisata.

Kombinasi dari ketiga variabel diplomasi ekonomi Indonesia, FDI Singapura, dan pengembangan pariwisata Batam dengan BP Batam sebagai mediator belum pernah dikaji secara terintegrasi dalam satu penelitian akademik sebelumnya, sehingga penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal yang relevan bagi pengembangan literatur Hubungan Internasional di Indonesia.

Dalam kerangka temporal yang dipilih, yaitu periode 2021 hingga 2025, penelitian ini mencakup fase pascapandemi COVID-19 yang sangat relevan karena pada periode ini terjadi beberapa perkembangan penting yang saling berkaitan. Pertama, pemulihan sektor pariwisata Indonesia dan Batam pasca pandemi yang mendorong pemerintah dan BP Batam untuk lebih dalam menarik investasi pariwisata dari Singapura. Kedua, pembukaan kembali jalur perjalanan Singapura-Batam melalui mekanisme *Vaccinated Travel Framework* pada April 2022, yang menjadi momen penting bagi kebangkitan arus wisatawan dan eksplorasi peluang investasi baru (Kompas 2022). Ketiga, penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Singapura melalui berbagai pertemuan bilateral yang menghasilkan komitmen-komitmen investasi baru, termasuk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Kementerian Perekonomian 2022). Keempat, berbagai kebijakan reformasi dan deregulasi yang memperluas kewenangan BP Batam dalam menarik investasi, termasuk di sektor pariwisata melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Nongsa dan KEK Kesehatan Sekupang (BP Batam 2024). Dengan memusatkan analisis pada rentang waktu ini, penelitian ini dapat menangkap dinamika yang relevan dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan ke depan.

Tabel 1 Data Investasi

Tahun	**Indikator**	**Nilai**
2015	Realisasi investasi oleh Singapura di Indonesia khususnya wilayah BBK (Batam – Bintan – Karimun)	USD 2,5 miliar
2019	Kunjungan wisatawan internasional berdasarkan data *United World Tourism Organization*	1,5 miliar
2021	Total *Foreign Direct Investment* Singapura ke Indonesia	USD 9,3 miliar, 16.760 proyek
2021 - 2023	Realisasi Penanaman Modal Asing oleh Singapura di Batam berdasarkan data Badan Pengusahaan Batam	USD 1,2 miliar
2023	Total realisasi investasi Singapura ke Indonesia berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal	USD 15,3 miliar

2023	Wisatawan mancanegara ke Batam berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam	56,46%

Sumber: (BKPM 2024; UNWTO 2024; Arjuna and Harto 2016; Kementerian Perekonomian 2022; BP Batam 2024; BPS Batam 2023)

Tabel diatas merupakan data dari jumlah investasi asing yang masuk ke Batam berdasarkan beberapa sumber yang sudah penulis sebutkan sebelumnya. Data investasi ini menunjukkan berapa banyak investasi yang masuk, berapa banyak wisatawan mancanegara per-tahun, juga realisasi penanaman modal asing oleh investor asing.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pariwisata Pulau Batam?
2. Bagaimana pemanfaatan *Foreign Direct Investment* asal Singapura di Batam?
3. Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik *Foreign Direct Investment* asal Singapura untuk pengembangan pariwisata Batam?

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan-batasan yang telah ditetapkan secara deliberatif untuk menjaga fokus, kedalaman, dan kebaruan analisis. Batasan tersebut mencakup empat dimensi utama yang saling berkaitan.

Pertama, dari segi besarnya investasi Singapura ke Batam. Penelitian ini memfokuskan pada investasi sektor pariwisata yang dapat diidentifikasi melalui data realisasi PMA di Batam berdasarkan klasifikasi sektor dari laporan BP Batam dan BKPM. Sektor pariwisata dalam penelitian ini didefinisikan secara luas mencakup akomodasi (hotel dan vila), restoran dan jasa boga, agen perjalanan, fasilitas rekreasi dan hiburan, convention center, marina dan pelabuhan wisata, serta kawasan wisata terpadu (*integrated resort*). Batasan ini diperlukan karena investasi Singapura di Batam sangat beragam sektornya, dan tanpa pembatasan yang jelas akan sulit untuk mengisolasi kontribusi spesifik diplomasi ekonomi terhadap pengembangan pariwisata.

Kedua, dari sisi strategi diplomasi ekonomi dalam relasi Singapura-Batam dengan menempatkan BP Batam sebagai mediator. Analisis diplomasi ekonomi dalam penelitian ini dibatasi pada instrumen dan mekanisme yang secara langsung berkaitan dengan upaya

menarik FDI Singapura ke sektor pariwisata Batam. Ini mencakup pertemuan *Working Group* BBK dan sub-kelompok pariwisata dalam kerangka kerjasama bilateral RI-Singapura, kegiatan promosi investasi dan road show yang dilakukan BP Batam di Singapura, koordinasi BP Batam dengan Kedutaan Besar RI di Singapura (KBRI Singapura) dalam memfasilitasi investor Singapura, pengembangan kebijakan insentif investasi di sektor pariwisata, serta peran BP Batam dalam proses perizinan dan fasilitasi investasi pariwisata dari Singapura. Dimensi diplomasi publik yang lebih luas seperti promosi budaya atau *city branding* berada di luar cakupan penelitian ini.

Ketiga, dari sisi temporal. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada periode 2021 hingga 2025. Penetapan tahun 2021 sebagai titik awal didasarkan pada beberapa pertimbangan: (a) tahun 2021 merupakan periode di mana dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata mulai dapat dilihat secara komprehensif; (b) pada tahun 2021 pemerintah Indonesia mulai menetapkan kebijakan pemulihan sektor pariwisata yang lebih terstruktur; dan (c) mulai tahun 2021, BP Batam secara lebih intensif mengembangkan strategi untuk menarik investasi pariwisata pasca pandemi, termasuk pengembangan KEK Pariwisata Nongsa. Sementara itu, penetapan 2025 sebagai batas akhir memungkinkan penelitian ini untuk mencakup implementasi berbagai kebijakan investasi terkini yang relevan.

Keempat, dari sisi alasan pemilihan Batam sebagai fokus penelitian. Batam dipilih bukan sekedar karena kedekatan geografisnya dengan Singapura, tetapi karena hubungan dari beberapa faktor: (a) Batam memiliki kelembagaan khusus berupa BP Batam yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia, sehingga memungkinkan analisis peran mediator yang unik; (b) arus wisatawan Singapura ke Batam sangat besar (mendominasi kunjungan wisman) namun investasi pariwisata Singapura di Batam relatif belum optimal, menciptakan bahan diskusi yang lebih lanjut; (c) terdapat mekanisme diplomasi ekonomi yang spesifik dan terstruktur dalam hubungan Indonesia-Singapura terkait kawasan Batam yang menjadikannya laboratorium ideal untuk menganalisis efektivitas diplomasi ekonomi; dan (d) Batam sedang dalam fase transformasi dari kawasan industri ke kawasan multifungsi yang mencakup pariwisata, sehingga momentum investasi pariwisata sangat relevan untuk diteliti saat ini.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk menganalisis potensi pariwisata di Pulau Batam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Foreign Direct Investment asal Singapura di Batam
3. Untuk menganalisis bagaimana upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik Foreign Direct Investment asal Singapura untuk pengembangan pariwisata di Batam

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

Secara akademik, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana instrument diplomasi ekonomi suatu negara dapat diarahkan untuk menarik investasi asing di sektor pariwisata melalui peran mediator kelembagaan sub-nasional. Penelitian ini memperkaya diskusi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya pada studi Ekonomi Politik Internasional dan diplomasi ekonomi, dengan memberikan bukti empiris tentang bagaimana mekanisme diplomasi ekonomi bekerja di tingkat sub-nasional melalui aktor kelembagaan seperti BP. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat serta berguna bagi kegiatan akademik selanjutnya.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan landasan konseptual mengenai bagaimana tiga konsep yang selama ini dikaji secara terpisah yakni diplomasi ekonomi, investasi asing di sektor pariwisata, dan peran kelembagaan mediator sub-nasional dapat diintegrasikan ke dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Penelitian ini menunjukkan bagaimana paradigma OLI dari Dunning dan Lundan, konsep destination competitiveness dari Ritchie dan Crouch, serta konsep diplomasi ekonomi dari Okano-Heijmans dan Rana dapat saling melengkapi untuk menjelaskan fenomena investasi pariwisata dalam konteks hubungan bilateral Indonesia–Singapura, sehingga menghasilkan temuan yang membantu menjelaskan hubungan antara instrumen diplomatik, mediasi kelembagaan, dan realisasi investasi pariwisata dalam konteks global.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi BP Batam, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap strategi dan mekanisme yang selama ini digunakan untuk menarik investasi pariwisata dari Singapura, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperkuat.

Bagi Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Singapura, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana koordinasi antara diplomasi bilateral dan fasilitasi investasi lokal dapat lebih dioptimalkan. Bagi pemerintah daerah dan nasional, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merancang kebijakan investasi pariwisata yang lebih efektif dan berorientasi pada diplomasi ekonomi, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan kawasan KEK Pariwisata Nongsa dan KEK Kesehatan Sekupang sebagai instrumen baru untuk menarik investasi pariwisata premium dari Singapura.

1.5. Kerangka Teoritis-Konseptual

Kajian teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada tiga konsep utama yang saling melengkapi, yaitu: (1) konsep investasi asing (Foreign Direct Investment), (2) konsep pariwisata internasional, dan (3) konsep diplomasi ekonomi dengan tiga indikator operasional. Pemilihan tiga konsep ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap konsep mewakili satu variabel kunci dalam penelitian yang dilakukan. Investasi asing menjelaskan subjek utama yang ingin ditarik yaitu FDI Singapura, pariwisata internasional menjelaskan sektor dan konteks di mana investasi tersebut difokuskan, dan diplomasi ekonomi menjelaskan instrumen dan mekanisme yang digunakan Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. Integrasi ketiga konsep ini memungkinkan penelitian untuk menjelaskan fenomena secara menyuluruh tanpa mengabaikan kompleksitas relasi antara aktor diplomatik, investor, dan kelembagaan lokal.

1.5.1. Investasi Asing (*Foreign Direct Investment*)

Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* – FDI) merupakan salah satu konsep sentral dalam studi Ekonomi Politik Internasional. Secara definitif, OECD mendefinisikan FDI sebagai suatu kategori investasi lintas batas yang mencerminkan tujuan investor di suatu negara untuk memperoleh kepentingan jangka panjang dalam perusahaan yang berdomisili di negara lain (OECD 2008). Kepentingan jangka panjang ini mengimplikasikan adanya hubungan yang berkelanjutan yang signifikan dari investor terhadap manajemen perusahaan investasi, yang biasanya diukur melalui kepemilikan saham sebesar 10% atau lebih. Definisi ini membedakan FDI dari investasi portofolio yang bersifat lebih spekulatif dan jangka pendek.

Teori FDI paling berpengaruh adalah paradigma OLI (*Ownership-Location-Internalization*) yang dikembangkan oleh John H. Dunning (1977) dan diperbarui secara substantif bersama Sarianna M. Lundan pada tahun 2008.

Paradigma ini berargumen bahwa suatu perusahaan akan melakukan FDI apabila memiliki tiga keunggulan sekaligus, keunggulan kepemilikan (*Ownership advantages*), yaitu aset spesifik perusahaan yang tidak dimiliki pesaing seperti teknologi, merek, atau kapabilitas manajerial, keunggulan lokasi (*Location advantages*), yaitu karakteristik negara atau wilayah tujuan yang menjadikannya lebih unggul dibandingkan di negara asal atau lokasi lain, dan keunggulan internalisasi (*Internalization advantages*), yaitu manfaat dari menginternalisasi transaksi melalui FDI dibandingkan dengan lisensi atau kontrak dengan pihak lokal (John H. Dunning and Sarianna M. Lundan 2008). Dalam konteks penelitian ini, faktor Lokasi dari Batam yang mencakup kedekatan dengan Singapura, status FTZ, dan keberadaan BP Batam merupakan variabel lokasional yang paling relevan untuk diteliti.

Dalam konteks negara berkembang, beberapa literatur kontemporer menekankan bahwa kualitas kelembagaan (*institutional quality*) merupakan determinan lokasi FDI yang semakin penting, terutama di tengah liberalisasi perdagangan dan investasi global yang telah mengurangi relevansi banyak faktor lokasi tradisional. Narula dan Pineli berargumen bahwa negara-negara berkembang yang mampu membangun kelembagaan yang efektif dan mengintegrasikannya dengan jaringan produksi global akan memiliki keunggulan yang berkelanjutan dalam menarik FDI berkualitas tinggi (Narula and Pineli 2019). Sementara itu, Nayyar dan Luiz menggunakan data panel dari India untuk menunjukkan bahwa biaya transaksi yang rendah dan regulasi yang efisien secara signifikan meningkatkan daya tarik suatu wilayah terhadap FDI (Rishika Nayyar and John M. Luiz 2024). Temuan-temuan ini relevan untuk memahami bagaimana BP Batam, sebagai institusi yang secara khusus dirancang untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kepastian regulasi yang berkontribusi terhadap daya tarik Batam bagi investor Singapura.

Dalam konteks Indonesia, arus masuk FDI telah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam dekade terakhir. BKPM melaporkan bahwa total realisasi FDI di Indonesia mencapai Rp 744,0 triliun (sekitar USD 47,3 miliar) pada tahun 2023, meningkat sebesar 13,7% dibandingkan tahun sebelumnya (BKPM 2024). Singapura secara konsisten mendominasi posisi sebagai negara asal FDI terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sebesar 28,2% dari total FDI pada tahun 2023, jauh di atas Tiongkok (17,1%), Hong Kong (9,4%), dan Jepang (8,7%). Fakta bahwa Singapura mendominasi FDI ke Indonesia dengan sebagian besar investasi masuk melalui Batam memberikan konteks penting bagi analisis dalam penelitian ini.

1.5.2. Pariwisata Internasional

Pariwisata internasional dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai sistem yang kompleks yang mencakup arus manusia (wisatawan), modal (investasi), pengetahuan (*know-how* manajemen destinasi), dan informasi (promosi) yang melewati batas-batas negara, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi, bisnis, kesehatan, atau budaya dari wisatawan sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi destinasi yang dikunjungi (Neil Leiper 1979; UNWTO 2020). Dalam kerangka analisis ini, pariwisata bukan sebagai aktivitas perjalanan, melainkan merupakan sistem industri yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan, yang di dalamnya terdapat aspek-aspek meliputi transportasi, akomodasi, atraksi, makanan dan minuman, *tour operator*, serta infrastruktur pendukung yang seluruhnya membutuhkan investasi yang substansial untuk dapat beroperasi pada level internasional.

Konsep daya saing destinasi pariwisata (*destination competitiveness*) yang dikembangkan oleh Ritchie dan Crouch memberikan kerangka yang bermanfaat untuk memahami bagaimana suatu destinasi mampu menarik wisatawan dan investor lebih banyak dibandingkan destinasi lainnya. Model Ritchie-Crouch mengidentifikasi dua kelompok determinan daya saing destinasi seperti faktor sumber daya inti (*core resources*) yang mencakup daya tarik alam, budaya, dan manusia, serta faktor daya dukung (*supporting factors*) yang mencakup infrastruktur, kebijakan pemerintah, manajemen destinasi, dan kualifikasi sumber daya manusia (Ritchie and Crouch 2003). Dalam konteks Batam, faktor sumber daya inti mencakup pantai, bahari, wisata belanja, dan kedekatan wilayah dengan Singapura. Namun, faktor daya dukung yang masih perlu ditingkatkan signifikan termasuk infrastruktur akomodasi berkelas internasional, manajemen destinasi yang profesional, serta insentif yang menarik bagi investor pariwisata.

Keterkaitan antara FDI dan pengembangan pariwisata telah menjadi topik kajian yang semakin penting dalam literatur pariwisata internasional. Tang dan Tan menggunakan analisis kausalitas Granger untuk menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal dua arah antara FDI dan perkembangan pariwisata. FDI mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan, sementara pertumbuhan pariwisata menarik lebih banyak FDI melalui peningkatan pendapatan dan permintaan akan investasi (Tang and Tan 2015).

Secara spesifik dalam konteks di wilayah Batam, potensi pariwisata yang besar dan kedekatan geografis dengan Singapura menciptakan kondisi ideal bagi masuknya FDI pariwisata dari investor Singapura yang sudah familiar dengan kawasan tersebut.

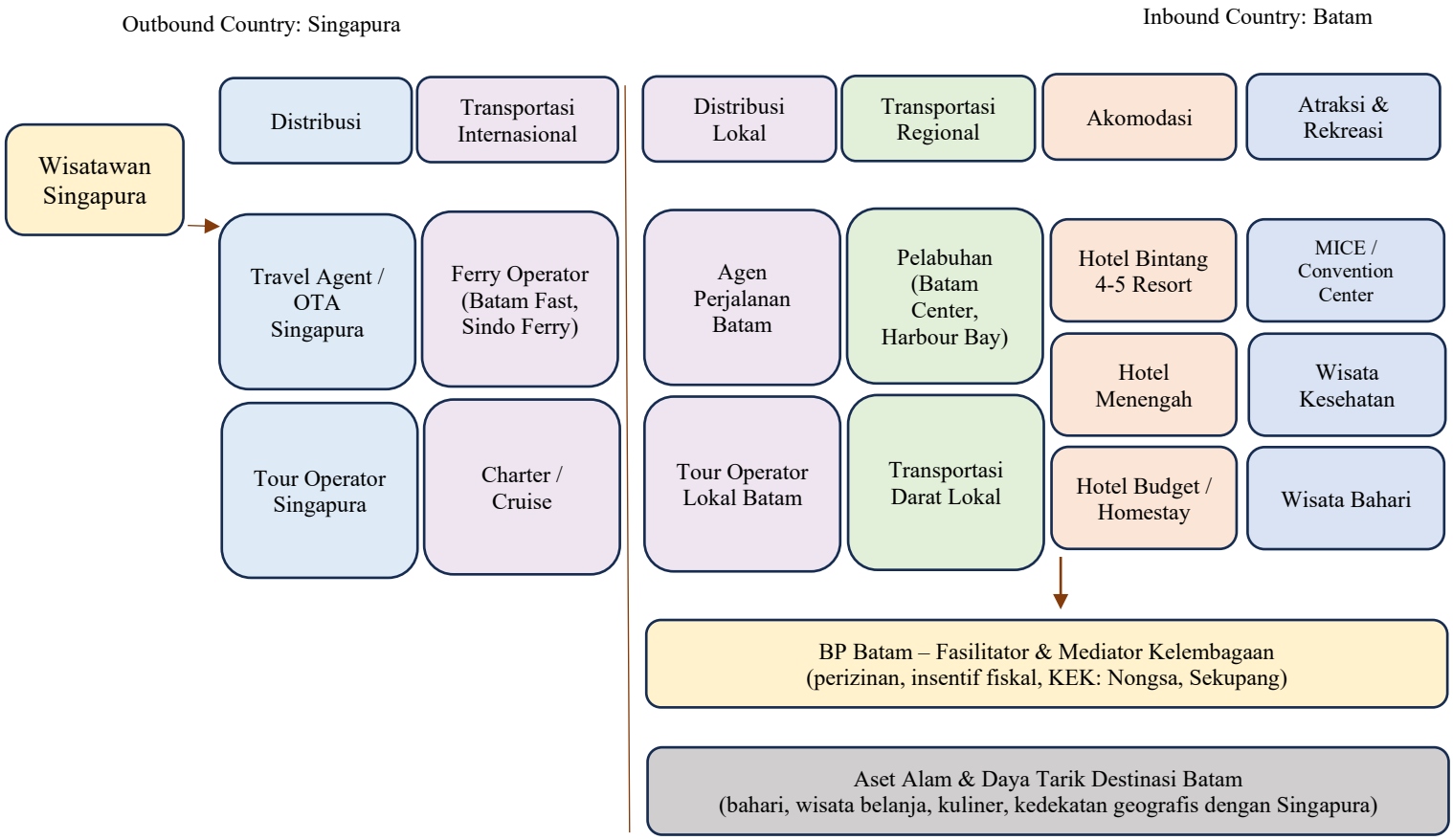
Wisatawan Singapura yang mengunjungi Batam yang jumlahnya mencapai lebih dari 400.000 kunjungan per-tahun sebelum pandemi menjadi bukti konkret Batam sebagai wilayah yang memiliki daya tawar yang tinggi bagi wisatawan (BPS Batam 2019). Investor Singapura yang sadar akan besarnya daya tawar ini seharusnya memiliki peluang yang kuat untuk berinvestasi di sektor perhotelan, restoran, rekreasi, dan fasilitas pariwisata lainnya di Batam.

Pengembangan pariwisata di Batam melibatkan sinergi antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. BP Batam berperan penting dalam menyediakan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan dan peningkatan akses jalan, taman kota, bandara, serta pelabuhan, sedangkan Pemerintah Kota Batam berfokus pada perumusan kebijakan, pembinaan, promosi, dan pengelolaan destinasi wisata. Dengan potensi wisata alam, kuliner, sejarah, budaya, dan belanja, Batam diarahkan untuk tidak hanya menjadi kawasan industri dan investasi, tetapi juga sebagai tujuan wisata unggulan di Kepulauan Riau. Salah satu pengembangan terbaru adalah kawasan New Nagoya, yang dirancang sebagai destinasi berbasis walkable city, sementara rencana jangka panjang BP Batam turut mencakup pengembangan kawasan MICE dan urban tourism di Batam Center. Salah satu program pengembangan yang dilakukan BP Batam adalah penataan kawasan New Nagoya sebagai destinasi wisata berbasis walkable city. Konsep ini menekankan pembangunan jalur pedestrian yang nyaman, pengaturan parkir dan lalu lintas, serta penciptaan ruang publik yang terintegrasi dengan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kawasan tersebut direncanakan memiliki jalur ramah pejalan kaki sepanjang kurang lebih 4,7 kilometer yang menghubungkan Pelabuhan Harbour Bay, Nagoya City Walk, Grand Batam Mall, hingga kawasan Jalan Taman Kota (BP Batam Terus Mengembangkan Pariwisata Batam Sebagai Motor Penggerak Perekonomian - BP Batam).

Untuk menyempurnakan konsep ini, penulis mengadaptasikan rantai nilai pariwisata Singapura-Batam yakni dengan menjelaskan bahwa Singapura berada pada posisi *outbound country* dengan *travel agent*, agen perjalanan daring, dan operator feri seperti Batam Fast dan Sindo Ferry sebagai penggerak arus wisatawan, sementara Batam berperan sebagai inbound country dengan segmen akomodasi berjenjang serta atraksi yang mencakup MICE, wisata kesehatan, dan wisata bahari. Yang membedakan kasus Batam dari model generik tersebut adalah keberadaan BP Batam sebagai lapisan mediasi kelembagaan tambahan yang mengatur perizinan, insentif fiskal, dan pengembangan KEK tematik, sebuah elemen yang umumnya tidak muncul secara eksplisit dalam model rantai nilai pariwisata global standar

karena sebagian besar destinasi tidak memiliki otoritas tunggal dengan kewenangan seluas itu.

Gambar 1. 1 Rantai Nilai Pariwisata Singapura-Batam



Sumber: Taufik

1.5.3. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi merupakan konsep penting yang menjadi fokus utama analisis dalam penelitian ini. Secara definitif, Okano-Heijmans mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai penggunaan sarana dan metode diplomatik untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi suatu negara, termasuk promosi ekspor, investasi asing, pemajuan kepentingan bisnis warga negara di luar negeri, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional (Maaike Okano-Heijmans 2011). Definisi ini menekankan bahwa diplomasi ekonomi merupakan aktivitas yang berada di persimpangan antara diplomasi tradisional dan kebijakan ekonomi luar negeri, di mana jaringan dan instrumen diplomatik digunakan secara terstruktur untuk mencapai hasil-hasil ekonomi yang konkret.

Rana menjelaskan lebih lanjut tiga fungsi utama diplomasi ekonomi. Pertama, fungsi komersial yang mencakup promosi perdagangan dan investasi; kedua, fungsi ekonomi makro yang mencakup negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi internasional; dan ketiga, fungsi kelembagaan yang mencakup fasilitasi hubungan bisnis-ke-bisnis (B2B) dan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait (Kishan S. Rana 2015). Dalam konteks penelitian ini, ketiga fungsi tersebut relevan untuk menganalisis bagaimana Indonesia menjalankan diplomasi ekonominya dalam menarik investasi Singapura ke sektor pariwisata Batam. Fungsi komersial dijalankan melalui promosi investasi pariwisata, fungsi ekonomi makro dijalankan melalui *Working Group* BBK dan perjanjian kerja sama ekonomi bilateral, dan fungsi kelembagaan dijalankan terutama melalui BP Batam yang berkoordinasi dengan KBRI Singapura.

Dalam penelitian ini, diplomasi ekonomi dioperasionalisasikan melalui tiga indikator yang saling melengkapi. Indikator pertama adalah promosi investasi (*investment promotion*), yang merujuk pada serangkaian kegiatan dan strategi yang dilakukan untuk menarik investor asing ke suatu sektor atau wilayah tertentu. Menurut UNCTAD promosi investasi yang efektif mencakup empat komponen utama, yaitu *image building* (membangun citra positif destinasi investasi), *investment generation* (secara aktif mengidentifikasi dan mendekati calon investor potensial), *investor servicing* (memberikan layanan dan fasilitasi kepada investor yang sudah masuk), dan *policy advocacy* (mendorong reformasi kebijakan yang mendukung investasi) (UNCTAD 2023). Dalam konteks penelitian ini, kegiatan promosi investasi pariwisata Batam oleh BP Batam dan KBRI Singapura termasuk kegiatan *road show*, *business matching,* forum investasi bilateral, dan pembuatan materi promosi merupakan bukti konkret dari indikator ini.

Indikator kedua adalah negosiasi dan kerangka kerja sama (*negotiation and cooperation framework*), yang merujuk pada proses dan hasil negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Singapura untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi di Batam. Kerangka kerja sama ini mencakup berbagai instrumen hukum dan kelembagaan seperti perjanjian bilateral investasi (*Bilateral Investment Treaty*/BIT), perjanjian penghindaran pajak berganda (*Tax Treaty*), kesepakatan dalam kerangka Working Group BBK, serta berbagai MoU dan Letter of Intent antara BP Batam dengan *counterparts* Singapura seperti *Economic Development Board* (EDB) Singapura (Achmad and Nasir; Kementerian Perekonomian 2022). Efektivitas negosiasi ini dapat diukur dari kualitas kerangka perlindungan investasi yang tersedia, kemudahan akses pasar bagi investor Singapura, dan konsistensi implementasi komitmen yang telah disepakati.

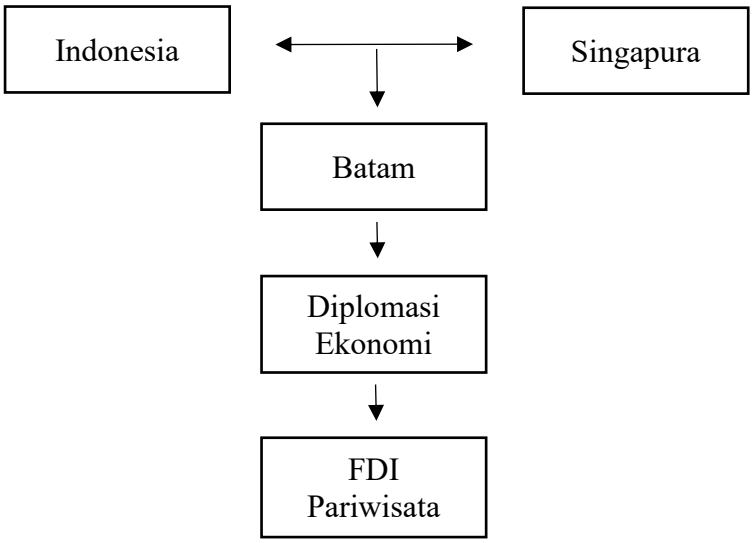
Indikator ketiga adalah fasilitasi kelembagaan (*institutional facilitation*), yang merupakan dimensi yang berkaitan paling langsung dengan peran BP Batam sebagai mediator. Fasilitasi kelembagaan merujuk pada kemampuan institusi terkait. Pada hal ini BP Batam dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi melalui penyediaan layanan perizinan yang efisien, pemberian insentif yang transparan dan kompetitif, penyelesaian masalah dan sengketa yang cepat, serta koordinasi yang efektif dengan berbagai instansi pemerintah terkait (Syuzairi et al. 2022; UNCTAD 2023). Indikator ini secara langsung mengoperasionalisasikan peran BP Batam sebagai mediator dalam penelitian ini, dan akan dianalisis melalui berbagai mekanisme kelembagaan yang dijalankan BP Batam dalam memfasilitasi masuknya investasi Singapura ke sektor pariwisata Batam. Ketiga indikator ini menjadi kerangka operasional yang komprehensif untuk menganalisis efektivitas diplomasi ekonomi Indonesia dalam konteks spesifik menarik FDI Singapura untuk pengembangan pariwisata Batam.

1.6. Asumsi Penelitian

Penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa potensi pariwisata Pulau Batam sebagai destinasi investasi asing bersifat tinggi, khususnya bagi investor Singapura, namun realisasi Foreign Direct Investment (FDI) masih jauh di bawah potensinya. Terdapat kesenjangan signifikan antara minat investor Singapura yang tercermin dari tingginya kunjungan wisatawan dengan realisasi investasi aktual, yang disebabkan oleh hambatan informasi, regulasi, serta infrastruktur pariwisata. Penelitian ini berasumsi bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik FDI Singapura berjalan melalui dua jalur utama, yaitu jalur diplomatik formal (Working Group BBK, perjanjian bilateral, dan KBRI Singapura) serta jalur kelembagaan lokal melalui BP Batam, dan efektivitasnya akan meningkat secara signifikan apabila kedua jalur tersebut beroperasi secara sinergis dan terkoordinasi.

Selain itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa BP Batam berperan tidak hanya sebagai fasilitator administratif berupa perizinan dan insentif, melainkan juga sebagai institutional entrepreneur yang aktif membentuk narasi investasi, membangun jaringan kepercayaan dengan komunitas bisnis Singapura, serta menjembatani kepentingan investor dengan agenda pembangunan pariwisata lokal. Dengan demikian, diplomasi ekonomi yang efektif melalui peran mediasi BP Batam diyakini mampu mengatasi berbagai hambatan investasi dan mendorong peningkatan FDI Singapura di sektor pariwisata Batam periode 2021–2025.

1.7. Kerangka Analisis



Gambar 1. 2 Kerangka Analisis

Kerangka analisis dalam proposal ini menjelaskan hubungan antara Indonesia dan Singapura dalam mendorong investasi pariwisata di Pulau Batam. Indonesia dan Singapura saling terhubung secara bilateral, dengan Batam berposisi sebagai titik tujuan utama investasi yang menjadi penghubung kedua negara. Alur kerangka menunjukkan bahwa hubungan bilateral tersebut mengalir menuju Batam, yang kemudian memicu proses Diplomasi Ekonomi. Diplomasi Ekonomi ini berfungsi sebagai mekanisme utama yang memfasilitasi masuknya Foreign Direct Investment (FDI) di sektor pariwisata. Secara keseluruhan, bagan ini menggambarkan Batam sebagai lokus strategis di mana diplomasi ekonomi Indonesia berperan penting dalam menyalurkan investasi dari Singapura ke sektor pariwisata Pulau Batam.